

DEGRADASI EKOLOGI DAN KAPITALISME REVOLUSI HIJAU DALAM BUKU TEKS SEJARAH SMA

Firizky Farawita

SMA Negeri 1 Bojongsoang

firizkyfarawita@gmail.com

Abstract: *This article reviews the appearance of ecological degradation and capitalism in Green Revolution topic in history subject textbook. The discourse of Green Revolution tends to make the reader assuming it as an achievement that had been done by New Order Era. By using critical discourse analysis, writer tries to understand the social construction which is built in that discussion through the language that is used in history subject textbook for 12th grade science programme written by I Wayan Badrika. Through this study, it found that the discourse is designed to construct Green Revolution as a successful programme, but not critically showed the side effects of ecological and cultural degradation. It reflects that the discourse maker tries to influence the readers with New Order Era ideological vision.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji munculnya degradasi ekologis dan kapitalisme dalam materi Revolusi Hijau dalam buku teks sejarah sekolah. Pewacanaan Revolusi Hijau cenderung membuat pembaca menganggapnya sebagai sebuah pencapaian yang telah dilakukan pemerintahan Orde Baru. Menggunakan Analisis Wacana Kritis yang mencoba memahami konstruksi sosial yang dibangun oleh materi tersebut melalui pembahasan yang ditulis dalam buku teks sejarah untuk kelas XII program ilmu alam yang ditulis oleh I Wayan Badrika. Kajian ini menemukan bahwa wacana yang dibangun dalam materi ini telah menempatkan Revolusi Hijau di Indonesia sebagai sebuah program yang berhasil, namun tidak secara kritis menampilkan dampak kerusakan lingkungan dan kultural yang ditimbulkan. Ini merefleksikan bahwa pembuat wacana mencoba menghegemoni pembaca dengan visi ideologi Orde Baru mengenai Revolusi Hijau adalah baik, bermanfaat, dan tidak berdampak negatif.

Kata Kunci: buku teks sejarah, degradasi ekologi, Orde Baru, Revolusi Hijau, analisis wacana kritis

PENDAHULUAN

Buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang umum digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang bersifat konvensional. Penggunaan buku teks memberikan kontribusi besar terhadap berlangsungnya pembelajaran. Nasution (dalam Prastowo, 2012, hlm. 169), menyebutkan beberapa fungsi, tujuan, dan manfaat buku teks pelajaran yaitu; sebagai bahan referensi atau bahan rujukan bagi peserta didik; sebagai bahan evaluasi; sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum; sebagai salah satu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik dan sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatan. Sementara itu tujuan dari buku teks adalah memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik.

Penyusunan materi dalam buku teks sejarah tentu saja tidak lepas dari pedoman kurikulum, dimana kurikulum merupakan sebuah produk politik dari masa pemerintahan tertentu. Dalam buku Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, Sukmadinata menyebutkan bahwa salah satu sumber pengembangan kurikulum adalah kekuasaan sosial-politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (2003, hlm. 265). Isi buku teks pelajaran pun berisikan muatan politik yang memiliki ideology tertentu yang diusung oleh suatu rezim pemerintahan tertentu.

Perkembangan politik masa Orde Baru sangat dengan nuansa 'pembangunan' yang digaungkan akan memberikan harapan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal ini bukan tanpa alasan, setelah pada pemerintahan sebelumnya (Orde Lama) keadaan perekonomian Indonesia merosot tajam dengan laju inflasi hingga 650 persen. Peningkatan kesejahteraan ini ditunjang dengan situasi politik dunia saat itu ketika sedang

berlangsung Perang Dingin antara Amerika Serikat kontra Uni Soviet.

Kondisi politik Indonesia yang cenderung condong ke Barat pada masa Orde Baru didukung dengan hadirnya ekonom-ekonom lulusan University of California, Berkeley. Mereka inilah yang menjadi arsitek utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Ekonom-ekonom lulusan Berkeley ini memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran (Pesek, 1993). Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969.

Pengembangan di bidang pertanian ini yang kemudian dikenal dalam buku-buku teks sejarah sebagai Revolusi Hijau. Buku-buku teks sejarah membahas Revolusi Hijau ini dalam nuansa yang sangat positif, lihat cuplikan berikut:

“Keberhasilan Revolusi Hijau sangat menggembirakan kehidupan para petani. Para petani dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Daerah-daerah pertanian yang sebelumnya memproduksi hasil tanaman secara terbatas, kini dapat menikmati hasil yang lebih baik. Kekurangan bahan pangan selama ini bisa diatasi” (Badrika, 2006, hlm. 17).

Dari cuplikan tersebut, bisa dilihat bahwa buku teks sejarah juga tidak lepas dari pengaruh politik dan ideologi untuk mencitrakan negara. Nordholt bahkan menyebutkan bahwa buku teks sejarah di sekolah merupakan dasar untuk mengembangkan kesadaran sejarah dan kesadaran nasional menurut versi negara (2015, hlm. 15). Dengan demikian, pembiasaan dan pewacanaan dalam buku teks bersifat mendikte, menguasai dan mengarahkan pembaca agar cenderung kepada satu ideologi tertentu, yaitu ideologi negara. Dalam teori tindakan komunikatif dari Habermas, tindakan

komunikatif atau rasionalitas komunikatif semacam ini disebut sebagai rasionalitas instrumental, dimana rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar seefektif mungkin kepentingan diri sendiri bersifat mendominasi atau menghegemoni (Lubis, 2015, hlm. 24) dan sifatnya monologis.

Sifat buku teks yang mendikte dan menghegemoni ini bertentangan dengan tujuan pendidikan yang diusung oleh Paulo Freire bahwa seharusnya pendidikan seharusnya bersifat emansipatoris atau membebaskan. Freire mengkritisi hal-hal yang mendominasi dalam pendidikan dimana siswa hanya dianggap sebagai objek kosong yang tidak memiliki pengetahuan. Buku teks yang mengacu kepada kurikulum nasional dianggap sebagai pengetahuan yang sudah ditentukan dan memberi otorisasi kepada guru untuk menginstruksikan dan menerapkan gagasan kepada siswa (Freire, 1973).

METODE

Untuk membedah buku teks pelajaran sejarah digunakan metode kualitatif analisis wacana kritis. Berbeda dari kritik bahasa, analisis wacana kritis tidak hanya melihat bahasa sebagai sebuah sarana dalam berkomunikasi namun juga melihatnya sebagai ‘bahasa sebagai praktik sosial’ dan mempertimbangkan pentingnya konteks dalam bahasa yang digunakan (Fairclough & Wodak, 1997). Bahasa atau wacana tidaklah netral, mereka membentuk dan mengatur hubungan sosial dan pengetahuan.

Hal ini berarti bahwa wacana memiliki efek untuk ‘mendisiplinkan’ dan menentukan kepercayaan dan perilaku apa yang bisa diterima dan bagaimana kepercayaan ini dinyatakan. Bourdieu berpendapat bahwa kekuasaan dari kelompok dominan dalam masyarakat memastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan merekalah yang dominan di atas yang lain, dan memberikan contoh bagaimana pendidikan merupakan sebuah proses dimana kekuatan dari kelompok dominan akan dilegitimasi melalui pewacanaan yang dibangun (Bourdieu, 1971).

Artikel ini melihat sejauh mana penulis buku mencoba menguasai dan membangun pengetahuan mengenai Revolusi Hijau melalui analisis pilihan kata dan bahasa yang digunakan. Sementara metode

analisis wacana kritis yang digunakan adalah model Fairclough (1997, hlm. 210)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Buku Pelajaran Sejarah Kelas XII Program Ilmu Alam karangan I Wayan Badrika (2) dokumen mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai buku teks sejarah misalnya Permendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, dan Permendiknas No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan buku teks sejarah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran, (3) dokumen dari media massa mengenai buku teks sejarah. Teknik analisis menggunakan teknik analisis wacana kritis menurut Fairclough yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

PEMBAHASAN

Dalam bukunya, Wodak menyebutkan bahwa penelitian analisis wacana kritis yang utuh akan menyaratkan teorisasi dan deskripsi baik mengenai proses sosial, dan struktur yang menimbulkan produksi teks dimana seorang individu atau kelompok menciptakan makna dalam interaksinya dengan teks. Konsekuensinya, ada tiga hal yang dibutuhkan dalam analisis wacana kritis adalah: konsep mengenai kekuasaan, latar sejarah, dan konsep ideologi (Fairclough, dalam Wodak, 2001, hlm. 3). Berangkat dari pemahaman itu, maka akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah yang akhirnya menghasilkan program Revolusi Hijau yang bersandar pada metode Cartesian Newtonian.

Paradigma Cartesian-Newtonian

Paradigma Cartesian-Newtonian merupakan tulang punggung untuk memahami peradaban modern yang mulai dibangun pada abad ke-XVII (Whitehead, 1967; Capra, 1983; Nasr, 1996; Kuhn, 1989; Bateson, 1979). Van Perseun menambahkan bahwa pengalaman sehari-hari tidak ter lepas dari filsafat dan gambaran tentang dunia yang dianut oleh manusia modern dipengaruhi oleh cara pandang sains modern (1991, hlm. 11). Semenjak berlangsungnya Renaissance pertengahan abad ke-XV, pandangan umum filsafat telah menempatkan manusia sebagai pusat. Inilah yang menyebabkan paradigma Cartesian-Newtonian berciri subjektivisme-antroposentrik dimana kesadaran

manusia adalah pusat dunia, sehingga terjadi dualisme antara manusia (subjek) dan diluar manusia (objek). Subjek bersifat superior dan berperan aktif untuk mendominasi dan mengeksploitasi objek yang inferior demi kepentingan subjek.

Bagi paradigma Cartesian-Newtonian, dunia adalah mesin besar yang terdiri dari materi dan gerak yang tunduk kepada hukum-hukum matematika. Ini memunculkan pemahaman bahwa alam sepenuhnya dapat dijelaskan, diramalkan, dan dikendalikan (mekanistik-deterministik). Alam yang menurut paradigma ini dibangun atas balok-balok atom (materi) hanya dipandang sebagai mesin mati tanpa makna simbolik kualitatif tanpa cita rasa etis dan estetis (reduksionisme-atomistik). "Nature is dull affair, soundless, scentless, colourless, merely the hurrying of material, endlessly, meaninglessly" (Whitehead, 1967, hlm.54).

Salah satu kisah sukses dari paradigma Cartesian-Newtonian adalah Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-XVIII. Penemuan-penemuan mesin yang mempermudah pekerjaan manusia (mekanisasi) merupakan akibat dari paradigma Cartesian-Newtonian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak itu, manusia menganggap dirinya telah terbebas dari ketergantungan terhadap alam sehingga terjadi hal yang sebaliknya, manusia yang bisa menguasai dan mengendalikan alam (Lubis, 2015, hlm. 17), dan menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya cara yang memuaskan dalam menjelaskan hukum-hukum alam (saintisme). Semenjak saat itulah diperkenalkan istilah modern yang mengacu pada industrialisasi dan mekanisasi pekerjaan.

Kerusakan Ekologi

Industrialisasi dan mekanisasi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Pertanian merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi sasaran industrialialisasi dan mekanisasi. Industrialisasi dan mekanisasi dalam bidang pertanian yang masuk ke Indonesia bukan tanpa sebab politis. Hal ini tidak lepas dari keadaan politik dunia dan konflik global yang bermula setelah Perang Dunia II berakhir. Munculnya dua penguasa besar dalam perpolitikan global membuat negara-negara kecil seperti Indonesia ikut pula terseret arus persaingan antara

kapitalisme dan sosialisme. Tepatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Presiden Amerika Serikat, Harry S. Thrumen untuk pertama kali melontarkan wacana ‘underdevelopment’ dalam rangka membendung pengaruh sosialisme di negara-negara dunia ketiga. Indonesia yang termasuk dalam wacana ‘underdevelopment’ kemudian mengusahakan pula langkah-langkah demi tercapainya ‘higher modernity’. Kata modernisasi juga berkonotasi sekularisasi, industrialisasi, persatuan nasional, serta partisipasi masa. Di masa Orde Baru, langkah-langkah menuju ‘higher modernity’ diperkuat pula dengan datangnya ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang paradigmanya berkiblat kepada modernisasi-kapitalisme Amerika Serikat. Para ekonom lulusan Amerika ini kemudian menawarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi inflasi pada saat itu adalah dengan melakukan rehabilitasi infrastruktur dan pengembangan pertanian.

Program pengembangan pertanian kemudian segera dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia yang terpuruk dibawah pemerintahan Orde Lama. Program ini kemudian disebut dengan Revolusi Hijau yang merupakan industrialisasi dan modernisasi pertanian. Buku teks sejarah untuk SMA kelas XII Program Ilmu Alam yang ditulis oleh I Wayan Badrika pun membahas materi Revolusi Hijau yang merupakan sub-judul dari materi Indonesia Pada Masa Orde Baru. Penulis buku memandang positif dan mendukung program Revolusi Hijau yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Seperti cuplikan berikut ini.

“Sebagian besar kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia berciri agraris. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan Indonesia Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian melalui usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan cara memperluas areal lahan pertanian” (Badrika, 2006, hlm.17).

Melalui kalimat ini pembaca kemudian diarahkan untuk berpikir bahwa ‘memperluas

lahan pertanian’ adalah benar dan boleh dilakukan demi tercapainya peningkatan pertanian. Penulis kemudian tidak memberikan keterangan wilayah Indonesia bagian mana yang diperluas untuk kebutuhan pertanian, dan lahan apa yang dipakai untuk perluasan itu. Padahal perluasan lahan pertanian itu kemudian mengakibatkan deforestasi besar-besaran di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Deforestasi (pengawahutan) adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies makhluk hidup lainnya. Sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh deforestasi (Risnandar, 2018). Pengawahutan ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah Orde Baru dengan dikeluarkannya PP No.21 Tahun 1970 yunto PP No.18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Pengawahutan yang bertujuan mengalihfungsikan lahan menjadi lahan pertanian menyebabkan kerusakan lingkungan karena fungsi hutan yang terutama adalah menyerap karbon yang dihasilkan oleh polutan. Sehingga berkurangnya lahan perhutanan berdampak langsung terhadap pencemaran udara akibat tingginya jumlah polutan. Laporan World Bank pada tahun 2003 menyatakan bahwa Jakarta merupakan kota paling tercemar dengan jumlah polutan tertinggi ketiga di dunia setelah Mexico City dan New Delhi (World Bank, 2006).

Dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat ‘perluasan lahan pertanian’ yang disebutkan dalam teks buku sejarah SMA Kelas XII untuk Program Ilmu Alam ini sama sekali tidak disinggung, padahal ini sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan jangka panjang. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki degradasi lingkungan terbesar terbukti dengan laju deforestasi mencapai 1,8 hektar per tahun yang menyebabkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang (Alam Endah, 2010). Ini menyebabkan pula penurunan kualitas lingkungan, peningkatan bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna.

Pengawahatan juga tidak hanya disebabkan karena alih fungsi lahan, program transmigrasi yang digaungkan oleh pemerintahan Orde Baru juga turut berperan dalam berkurangnya lahan perhutanan di Indonesia. Buku teks juga menyebutkan hal ini dengan nada yang sangat optimis "... Upaya pemindahan penduduk ini masih tetap berlanjut sampai sekarang dan merupakan satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ..." (Badrika, 2006 hlm.18) Padahal sebuah penelitian yang dilakukan oleh *World Resources Institute* (Tt.) melaporkan bahwa selama program transmigrasi yang berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan 1999, pemerintah telah membuka lahan sebanyak dua juta hektar.

Di Indonesia, program Revolusi Hijau termanifestasi dalam Panca Usaha Tani, yaitu (1) penggunaan bibit unggul, (2) pengolahan tanah yang baik, (3) pemilihan pupuk yang lengkap dan baik, (4) pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan (5) irigasi yang baik. Penggunaan bibit unggul terutama ditujukan kepada jenis tanaman padi sebagai makanan pokok di Indonesia.

"Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan cara penyuluhan, pencarian, dan pencarian bibit unggul. Berbagai macam penelitian dilakukan di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan varietas tanaman yang unggul sesuai dengan kondisi alam Indonesia" (Badrika, 2006, hlm. 17).

Penggunaan bibit unggul ini dibuktikan dengan digunakannya bibit padi jenis IR8 yang merupakan hasil penyilangan genetik padi jangkung Indonesia yang memiliki kualitas baik namun durasi panen lama dan padi pendek Filipina, yang berkualitas kurang baik namun memiliki durasi panen yang pendek.

Padi jenis IR8 kemudian digunakan secara luas oleh petani di Indonesia demi meningkatkan produksi beras. Sayangnya penggunaan padi jenis ini kemudian menggeser penggunaan jenis padi local. Di tahun 2008, Bapak Suyatmo, Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Departemen Pertanian yang juga merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Deptan, mengungkapkan bahwa penanaman padi varietas lokal hanya tinggal 10 sampai 15 persen saja.

Walaupun memiliki produktivitas yang tinggi, padi IR8 sangat rentan terhadap hama tanaman. Itu sebabnya mengapa poin empat dalam program Panca Usaha Tani adalah 'pengendalian hama dan penyakit tanaman'. Padahal varietas lokal memiliki karakteristik tertentu hasil adaptasi dengan pertanian setempat dan jika disilangkan dengan tepat berpotensi menghasilkan padi yang berproduktivitas tinggi, tanpa perlu biaya pemupukan dan pestisida (Kompas.com, 2008).

Penggunaan pestisida yang berlebihan ternyata tidak mampu mengontrol hama karena secara tak sengaja menciptakan kekebalan hama baru, sehingga para petani akhirnya tergantung dengan pupuk kimia dan racun pestisida. Di Jawa, selama awal Revolusi Hijau, rata-rata penggunaan pupuk kimia untuk per hektar tanah meningkat 50%, sementara penggunaan pestisida naik dua kali lipat (Pincus, 1996).

Kapitalisasi Segalanya

Untuk menunjang program Revolusi Hijau yang diberlakukan secara massif, pemerintahan Orde Baru bersifat ramah modal. Orientasi dari kebijakannya adalah membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak mungkin pemilik modal dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk menunjang program Revolusi Hijau ini pemerintah Orde Baru menjalankan konsep deregulasi dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Sejak saat itu, secara teori muncullah ketergantungan (interdependency) antara Utara (negara-negara maju kapitalis, terutama di Eropa dan Amerika Serikat), dengan Selatan (negara-negara berkembang dunia ketiga). Kenyataannya saling ketergantungan ini malah menjadi ketergantungan antara Negara-negara Selatan kepada negara-negara Utara yang bisa memberikan modal dalam rangka percepatan pembangunan. Ketergantungan ini membuat negara berkembang kesulitan lepas dari negara kaya sebab ketergantungan ini menyebabkan akumulasi kapital yang membuat negara kaya semakin kaya dan negara miskin semakin berhutang. Sebagai bentuk baru model kapitalisme pertanian merupakan hegemoni yang mengekang. Invasi kebudayaan ini berhasil berkat dukungan

International Monetary Foundation (IMF). Hayter mencatat Bank Dunia mendukung pasar bebas, sektor swasta, mendorong modal asing dan kemudahan investasi asing, menentang penggunaan kontrol harga, serta menolah subsidi investasi sarana umum yang memungkinkan Revolusi Hijau berkembang. Mereka pun menolak model pemilikan tanah komunal dan menolah pelaksanaan pelaksanaan land-reform dan menekan produktivitas. Mereka mengadvokasi integrasi negara selatan pada pasar dunia, atau dengan kata lain meningkatkan ketergantungan dunia (Hayter, 1985).

SIMPULAN

Pewacanaan Revolusi Hijau dalam buku teks sejarah kelas XII untuk program ilmu alam yang ditulis oleh I Wayan Badrika penulis memberikan sudut pandang yang pro dengan ideologi pemerintah Orde Baru. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan mengenai dampak sampingan yang timbul berupa degradasi ekologi yang cukup parah berupa deforestasi dan homogenisasi hutan. Padahal, selain memaparkan fakta seharusnya buku teks bisa juga menjadi media bagi peserta didik untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

REFERENSI

- Bateson, Gregory. (1979). *Mind and Nature*. Newyork: E.P. Dutton.
- Badrika, I Wayan. (2006). *Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu Alam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Capra, Fritjof. (1983). *The Turning Point: Science, Society, and The Raising Culture*. London: Flamingo.
- Fairclough, N. & Wodak, R. (1997) "Critical Discourse Analysis," in T. van Dijk (ed.) *Discourse as Social Interaction*, pp. 258-84. London: SAGE.
- Freire, Paulo. (1972). *Education on Critical Consiousness*. New York: The Continuum Internasional Publibankbashing Group Inc.
- Hayter, Teresa. (1985). *The Creation of World Poverty*. London:Pluto Press. Diakses tanggal 07 April 2018. Tersedia <https://libgen.pw/item/detail/id/1309601?id=1309601>

- Kompas.com. (2008). *Ribuan Varietas Padi Lokal Hilang*. Diakses tanggal 6 April 2018. Tersedia: Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/15/01281789/ribuan.varietas.padi.lokal.hilang>
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminisme, Postkolonial, hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasr, Sayyed Hossein. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Nordholt, H.S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2015). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Buku Obor
- Pesek, William. (8 Maret 2010). 'Berkeley Mafia' now has \$US514b at stake. The Sydney Morning Herald. Diakses dari <https://www.smh.com.au/business/berkeley-mafia-now-has-us514b-at-stake-20100308-pqzt.html>
- Pincus, Jonathan. (1996). *Class, Power, and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java*. London: Palgrave Macmillan.
- Prastowo, Andi. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Risnandar, C. (2018). *Deforestasi*. Dipetik 6 April 2017, dari Jurnal Bumi: <https://jurnalbumi.com/deforestasi/>
- Van Perseun, Cornelis Anthonie. (1991). *Orientasi di Alam Filsafat*. Jakarta: Gramedia
- Wodak, Ruth. (2001). "What Is CDA About: A Summary of Its History, Important Concept, and Its Developments" in Wodak & Meyer (Eds), *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publication.
- Whitehead, Alfred North. (1997). *Science and the Modern World*. Newyork: The New American Library.
- World Bank. (2006). *Annual Report. New York: V-N-Publisher*. Diakses tanggal 7 April 2018. Tersedia: http://siteresources.worldbank.org/INTANNREP2K6/Resources/2838485-1158333614345/AR06_final_LO_RES.pdf
- World Recources Institute. (Tt.). *Deforestasi dan Degradasi Hutan*. Diakses tanggal 7 April 2018. Tersedia https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap3_id.pdf